



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.33,2016

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH.ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. **Pedoman
Pelaksanaan. Evaluasi. Kinerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pemerintah Kabupaten Bantul.**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 17 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantul;

6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
9. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
11. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
12. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
13. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Evaluasi kinerja SKPD adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan capaian kinerja SKPD berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup evaluasi kinerja SKPD mencakup evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi melalui evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja SKPD berdasarkan criteria yang ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan peringkat kategori hasil evaluasi kinerja SKPD.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA SKPD Bagian Kesatu Pelaksana Evaluasi

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi kinerja pada semua SKPD.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas :
 - a. evaluasi kinerja semesteran; dan
 - b. evaluasi kinerja tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Bappeda, DPPKAD, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mulai Tahun 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,

pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja SKPD terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi kinerja SKPD yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

1. evaluasi atas kriteria evaluasi kinerja; dan
2. penilaian dan penyimpulan.

II. EVALUASI ATAS KRITERIA EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja SKPD difokuskan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan, sehingga melalui evaluasi kinerja SKPD dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a. kesungguhan SKPD dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil;
 - b. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi melalui e-SAKIP;
 - c. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi; dan
 - d. keterkaitan di antara perencanaan SKPD dengan penganggaran, pelaksanaan dan capaian serta pelaporannya.
2. Evaluasi kinerja SKPD terdiri atas evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi kinerja yaitu pencapaian target kinerja organisasi.
3. Evaluasi kinerja dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:
 - a. evaluasi kinerja semesteran, merupakan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja organisasi mulai bulan januari sampai dengan bulan juni tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 - b. evaluasi kinerja tahunan, merupakan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun.
4. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja SKPD beserta penjelasannya untuk evaluasi kinerja SKPD semesteran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
5. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja SKPD beserta penjelasannya untuk evaluasi kinerja SKPD tahunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi kinerja SKPD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
 - a. dalam melakukan penilaian, terdapat 2 variable yaitu:
 - 1) kriteria; dan
 - 2) sub-kriteria.
 - b. setiap kriteria dan sub-kriteria evaluasi diberikan alokasi nilai;
 - c. penilaian atas kriteria dan sub kriteria berlaku untuk 2 (dua) entitas, yaitu:
 - 1) Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; dan
 - 2) Kecamatan.
 - d. alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja SKPD Semesteran adalah sebagai berikut:
 - 1) Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25%	Keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	25
2	Pelaksanaan	35%	a. capaian realisasi fisik b. capaian realisasi keuangan c. Ketepatan proses pengadaan barang dan jasa d. jumlah Revisi DPA SKPD e. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan	7,5 7,5 10 5 5
3	Pelaporan	25%	a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui Simdalbangda c. ketepatan laporan evaluasi hasil RKPD d. entry data kinerja dalam e-SAKIP	5 10 5 5
4	Capaian	5%	capaian nilai IKM	5
5	Evaluasi	10%	a. evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD b. Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	5 5
Jumlah Total		100%		100

2) Kecamatan

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25 %	Keselaranan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	25
2	Pelaksanaan	25%	a. capaian realisasi fisik dan keuangan b. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa dalam SIRUP c. jumlah revisi DPA SKPD d. ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	10 5 5 5
3	Pelaporan	25%	a. ketepatan laporan aset per triwulan b. ketepatan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan melalui Simdabangda c. ketepatan laporan evaluasi hasil RKPD d. entry data kinerja dalam e-SAKIP	5 10 5 5
4	Capaian	15%	a. ketepatan Waktu Penerbitan Peraturan Desa b. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD c. capaian nilai IKM	5 5 5
5	Evaluasi	10%	a. evaluasi AKIP b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	5 5
Jumlah Total		100%		100

e. alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja SKPD Tahunan adalah sebagai berikut:

1) Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25 %	Keselaranan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	25
2	Pelaksanaan	25%	a. capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. ketepatan proses pengadaan barang dan jasa c. jumlah Revisi DPA SKPD	5 10 5

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
			d. ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan	5
3	Pelaporan	15%	a. ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan b. ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui Simdalbangda	5 10
4	Capaian	25%	a. capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RKPD b. capaian kinerja dalam e-SAKIP c. capaian nilai IKM	10 10 5
5	Evaluasi	10%	a. evaluasi AKIP b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	5 5
Jumlah Total		100%		100

2) Kecamatan

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25 %	Keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	25
2	Pelaksanaan	25%	a. capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa dalam SIRUP c. jumlah revisi DPA SKPD d. ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	10 5 5 5
3	Pelaporan	15%	a. ketepatan laporan aset per triwulan b. ketepatan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan melalui Simdalbangda	5 10
4	Capaian	25%	a. capaian Indikator kinerja organisasi sesuai RKPD b. Ketepatan waktu penerbitan Peraturan Desa c. fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD	5 5 5

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
			d. capaian kinerja dalam e-SAKIP	5
			e. capaian nilai IKM	5
5	Evaluasi	10%	a. evaluasi AKIP	5
			b. hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	5
Jumlah Total		100%		100

- f. Setiap sub-kriteria akan dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai kriteria pemenuhan sub-kriteria tersebut, dengan nilai ketentuan pemberian nilai sebagai berikut:
- 1) nilai 5 (lima) untuk kategori memuaskan;
 - 2) nilai 4 (empat) untuk kategori baik;
 - 3) nilai 3 (tiga) untuk kategori cukup;
 - 4) nilai 2 (dua) untuk kategori kurang; dan
 - 5) nilai 1 (satu) untuk kategori buruk.
- g. pada sub kriteria “jumlah revisi DPA SKPD”, apabila revisi DPA SKPD disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA SKPD tidak diperhitungkan dalam penilaian.
- h. dalam kriteria perencanaan, apabila RPJMD dan Renstra belum ditetapkan, maka penilaian kriteria perencanaan hanya dilakukan pada penilaian keselarasan antara DPA dengan RKPD dan KUA-PPAS baik pada anggaran murni maupun perubahan.
- i. beberapa ketentuan khusus dalam evaluasi kinerja semesteran diatur sebagai berikut:
- 1) dalam sub kriteria “hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya”, yang dilakukan penilaian adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada pemeriksaan LKPD; dan
 - 2) dalam sub kriteria yang berkaitan dengan penyampaian laporan maupun input data realisasi yang dilaksanakan melebihi batas waktu yang ditetapkan atau setelah tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan, maka diberikan nilai 0 (nol).
- j. beberapa ketentuan khusus dalam evaluasi kinerja tahunan diatur sebagai berikut:
- 1) dalam sub kriteria “hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya”, yang dilakukan penilaian adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat DIY dan/atau BPK RI, termasuk pemeriksaan BPK RI pada pemeriksaan LKPD.
 - 2) dalam sub kriteria yang berkaitan dengan penyampaian laporan maupun input data realisasi akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
 - 3) penyampaian laporan atau input data realisasi yang dilaksanakan setelah tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya, maka diberikan nilai 0 (nol);
 - 4) dalam sub kriteria “capaian realisasi fisik dan keuangan”, apabila target kinerja program/kegiatan tidak tercapai disebabkan karena kejadian khusus diluar perencanaan, antara lain perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan daerah yang ditetapkan setelah program/kegiatan berjalan, maka tidak diperhitungkan dalam penilaian;

- 5) dalam sub sub kriteria “capaian realisasi keuangan”, diberikan batas maksimal efisiensi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 6) dalam sub kriteria “proses pengadaan barang dan jasa” hanya dilakukan penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran murni dan tidak mempertimbangkan proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran perubahan.
- k. pada sub kriteria “fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD”, penilaian sub sub kriteria Fasilitasi Serapan DD khusus Tahun Anggaran 2016 hanya memperhitungkan serapan DD Tahap I dan Tahap II.
3. Setelah setiap kategori diberikan nilai, maka penyimpulan dilakukan sebagai berikut:
- a. tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap kategori pada setiap sub-kriteria sehingga ditemukan suatu angka tertentu;
 - b. untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; dan
 - c. tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-kriteria yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu dengan total nilai tertinggi 100.

IV. PELAPORAN DAN PENETAPAN HASIL EVALUASI

1. tim Evaluasi Kinerja SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja SKPD semesteran dan hasil evaluasi kinerja SKPD tahunan kepada Bupati;
2. hasil evaluasi kinerja semesteran disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
3. hasil evaluasi kinerja tahunan disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
4. berdasarkan laporan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, Bupati menetapkan hasil evaluasi kinerja SKPD dengan Keputusan Bupati.

V. PENGHARGAAN

Bupati memberikan penghargaan kepada SKPD dengan nilai tertinggi I, II dan III dalam evaluasi kinerja semesteran dan evaluasi kinerja tahunan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN EVALUASI
 KINERJA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA SKPD SEMESTERAN

A. SKPD Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	Perencanaan		
1.	Keselarasn DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	a. apabila keselarasn mencapai 100% b. apabila keselarasn antara 90% s/d < 100% c. apabila keselarasn antara 80% s/d < 90% d. apabila keselarasn antara 70% s/d < 80% e. apabila keselarasn < 70%	5 4 3 2 1
B.	Pelaksanaan		
1	Capaian realisasi fisik	a. apabila minimal capaian mencapai 40% b. apabila capaian antara 35% s/d < 40% c. apabila capaian antara 30% s/d < 35% d. apabila capaian antara 25% s/d < 30% e. apabila capaian < 25%	5 4 3 2 1
2	Capaian realisasi keuangan	a. apabila minimal capaian mencapai 35% b. apabila capaian antara 30% s/d < 35% c. apabila capaian antara 25% s/d < 30% d. apabila capaian antara 20% s/d < 25% e. apabila capaian < 20%	5 4 3 2 1
3.	Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP	a. RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya	5

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		b. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan	4
		c. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan	3
		d. RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan	2
		e. RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan	1
	b. Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	1) proses pengadaan barang dan jasa konstruksi	a) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Maret tahun berkenaan	5
		b) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan April tahun berkenaan	4
		c) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan	3
		d) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Juni tahun berkenaan	2
		e) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Juni tahun berkenaan	1
	2) proses pengadaan barang dan jasa non konstruksi	a) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan	5
		b) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juni tahun berkenaan	4
		c) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan	3
		d) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan	2
		e) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Agustus tahun berkenaan	1
4.	Jumlah Revisi DPA SKPD	a. apabila tidak ada revisi DPA-SKPD	5
		b. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 1 kali	4
		c. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 2 kali	3
		d. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 3 kali	2

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		e. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan lebih dari 3 kali	1
5.	Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan	a. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $\geq 80\%$ b. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $70\% \text{ s/d } < 80\%$ c. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $60\% \text{ s/d } < 70\%$ d. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $50\% < 60\%$ e. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $< 50\%$	5 4 3 2 1
C.	Pelaporan		
1.	Ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan	a. apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi b. apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi c. apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi d. apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi e. apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	5 4 3 2 1
2.	Ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui Simdalbangda		
	a.ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan	a. apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan b. apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya c. apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya d. apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya e. apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	5 4 3 2 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	b. kelengkapan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	a. apabila laporan lengkap 100% b. apabila kelengkapan laporan mencapai 90% s/d < 100% c. apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d < 90% d. apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d < 80% e. apabila kelengkapan laporan mencapai < 70%	5 4 3 2 1
3	Ketepatan laporan evaluasi hasil RKPD	a. apabila laporan disampaikan tepat waktu dan benar, yaitu 5 hari kerja setelah triwulan berakhir b. apabila laporan disampaikan 6 s/d 8 hari kerja setelah triwulan berakhir c. apabila laporan disampaikan 9 s/d 11 hari kerja setelah triwulan berakhir d. apabila laporan disampaikan 12 s/d 14 hari kerja setelah triwulan berakhir e. apabila laporan disampaikan lebih dari 14 hari kerja setelah triwulan berakhir	5 4 3 2 1
4.	Hasil input realisasi kinerja SKPD per triwulan sampai eselon IV dalam e-SAKIP	a. apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya b. apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya c. apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya d. apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya e. apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	5 4 3 2 1
D.	Capaian		
1.	Capaian nilai IKM	a. apabila nilai IKM 90 s/d 100 b. apabila nilai IKM 80 s/d < 90 c. apabila nilai IKM 70 s/d < 80 d. apabila nilai IKM 60 s/d < 70 e. apabila nilai IKM < 60	5 4 3 2 1
E.	Evaluasi		
1.	Evaluasi akuntabilitas kinerja	a. apabila nilai evaluasi AKIP 90 s/d 100 b. apabila nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 90	5 4

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		c. apabila nilai evaluasi AKIP 70 s/d < 80	3
		d. apabila nilai evaluasi AKIP 60 s/d < 70	2
		e. apabila nilai evaluasi AKIP < 60	1
2.	Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	a. apabila hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan nihil (tidak ada) dan/atau temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi hanya bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti/diselesaikan paling lama 1 bulan sejak LHP diterima	5
		b. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan terdapat enyeteran/pengembalian dan telah ditindaklanjuti/diselesaikan sebelum LHP keluar	4
		c. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan berupa penyeteran/pengembalian, selesai ditindaklanjuti paling lama 1 bulan, sejak LHP diterima	3
		d. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan baik bersifat administratif dan/atau penyeteran/pengembalian, selesai ditindaklanjuti lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan, sejak LHP diterima	2
		e. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan bersifat administratif dan/atau penyeteran/pengembalian, ditindaklanjuti lebih dari 2 bulan, sejak LHP diterima	1

B. Kecamatan

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	Perencanaan		
1.	Keselarasn DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	a. apabila keselarasn mencapai 100% b. keselarasn mencapai 90% s.d < 100% c. keselarasn mencapai 80% s.d < 90% d. keselarasn mencapai 70% s.d < 80% e. keselarasn mencapai < 70%	5 4 3 2 1
B.	Pelaksanaan		
1.	Capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun		
	a. Capaian realisasi fisik	a. apabila minimal capaian mencapai 40% b. apabila capaian antara 35% s/d < 40% c. apabila capaian antara 30% s/d < 35% d. apabila capaian antara 25% s/d < 30% e. apabila capaian < 25%	5 4 3 2 1
	b. Capaian realisasi keuangan	a. apabila minimal capaian mencapai 35% b. apabila capaian antara 30% s/d < 35% c. apabila capaian antara 25% s/d < 30% d. apabila capaian antara 20% s/d < 25% e. apabila capaian < 20%	5 4 3 2 1
2.	Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP	a. RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya b. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan c. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan d. RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan e. RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan	5 4 3 2 1
3.	Jumlah Revisi DPA SKPD	a. apabila tidak ada revisi DPA-SKPD b. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 1 kali	5 4

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		c. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 2 kali	3
		d. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 3 kali	2
		e. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan lebih dari 3 kali	1
4.	Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (triwulan I dan II)	a. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $\geq 80\%$	5
		b. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $70\% \leq < 80\%$	4
		c. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $60\% \leq < 70\%$	3
		d. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $50\% < 60\%$	2
		e. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $< 50\%$	1
C.	Pelaporan		
1.	Ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan (triwulan I dan II)	a. apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi	5
		b. apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi	4
		c. apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi	3
		d. apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	2
		e. apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	1
2.	Ketepatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui Simdalbangda		
	a. Ketepatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	a. apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya	5
		b. apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya	4
		c. apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya	3
		d. apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya	2
		e. apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	b. Kelengkapan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	a. apabila laporan lengkap 100% b. apabila kelengkapan laporan mencapai 90% s/d < 100% c. apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d < 90% d. apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d < 80% e. apabila kelengkapan laporan mencapai < 70%	5 4 3 2 1
3.	Ketepatan laporan evaluasi hasil RKPD	a. apabila laporan disampaikan tepat waktu, yaitu 5 hari kerja setelah triwulan berakhir b. apabila laporan disampaikan 6 s/d 8 hari kerja setelah triwulan berakhir c. apabila laporan disampaikan 9 s/d 11 hari kerja setelah triwulan berakhir d. apabila laporan disampaikan 12 s/d 14 hari kerja setelah triwulan berakhir e. apabila laporan disampaikan lebih dari 14 hari kerja setelah triwulan berakhir	5 4 3 2 1
4	Hasil input realisasi kinerja SKPD per triwulan sampai eselon IV dalam e-SAKIP	a. apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya b. apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya c. apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya d. apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya e. apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	5 4 3 2 1
D.	Capaian		
1.	Ketepatan Waktu Penerbitan Perdes APBDesa	a. Perdes ditetapkan pada bulan November tahun anggaran sebelumnya b. Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Desember tahun anggaran sebelumnya c. Perdes ditetapkan pada tanggal 16 s/d 31 Desember tahun anggaran sebelumnya d. Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Januari tahun berjalan e. Perdes ditetapkan setelah 15 Januari tahun berjalan	5 4 3 2 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
2.	Fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan serapan DD		
	a. Fasilitasi ketepatan pencairan ADD	a. apabila waktu pencairan dilaksanakan sebelum 7 hari kerja sebelum bulan berikutnya b. apabila waktu pencairan dilaksanakan sebelum 4 – 6 hari kerja sebelum bulan berikutnya c. apabila waktu pencairan dilaksanakan sebelum 1 – 3 hari kerja sebelum bulan berikutnya d. apabila waktu pencairan dilaksanakan pada bulan berjalan, maksimal 7 hari kerja e. apabila waktu pencairan dilaksanakan pada bulan berjalan, lebih dari 7 hari kerja	5 4 3 2 1
	b. Fasilitasi Serapan DD tahap III tahun sebelumnya serta tahap I tahun berjalan	a. apabila serapan mencapai 80% s/d 100% b. apabila serapan mencapai 75% s/d < 80% c. apabila serapan mencapai 65% s/d < 75% d. apabila serapan mencapai 50% s/d < 65% e. apabila serapan mencapai < 50%	5 4 3 2 1
3.	Capaian nilai IKM	a. apabila nilai IKM 90 s/d 100 b. apabila nilai IKM 80 s/d < 90 c. apabila nilai IKM 70 s/d < 80 d. apabila nilai IKM 60 s/d < 70 e. apabila nilai IKM < 60	5 4 3 2 1
E.	Evaluasi		
1.	Evaluasi AKIP	a. apabila nilai evaluasi AKIP 90 s/d 100 b. apabila nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 90 c. apabila nilai evaluasi AKIP 70 s/d < 80 d. apabila nilai evaluasi AKIP 60 s/d < 70 e. apabila nilai evaluasi AKIP < 60	5 4 3 2 1
2.	Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	a. apabila hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang harus diperhatikan nihil (tidak ada) dan/atau temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi hanya bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti/ diselesaikan paling lama 1 bulan sejak LHP diterima	5

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		b. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/ hal-hal yang harus diperhatikan terdapat penyetoran/pengembalian dan telah ditindaklanjuti/diselesaikan sebelum LHP keluar	4
		c. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/ hal-hal yang harus diperhatikan berupa penyetoran/pengembalian, selesai ditindaklanjuti paling lama 1 bulan, sejak LHP diterima	3
		d. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/ hal-hal yang harus diperhatikan baik bersifat administratif dan/atau penyetoran/pengembalian, selesai ditindaklanjuti lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan, sejak LHP diterima	2
		e. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/ hal-hal yang harus diperhatikan bersifat administratif dan/atau penyetoran/ pengembalian, ditindaklanjuti lebih dari 2 bulan, sejak LHP diterima	1

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN EVALUASI
 KINERJA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA SKPD TAHUNAN

1) SKPD Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	PERENCANAAN		
1.	Keselarasn DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	a. apabila keselarasn mencapai 100% b. apabila keselarasn antara 90% s/d < 100% c. apabila keselarasn antara 80% s/d < 90% d. apabila keselarasn antara 70% s/d < 80% e. apabila keselarasn < 70%	5 4 3 2 1
B.	PELAKSANAAN		
1.	Capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun		
	a. Capaian realisasi fisik pada akhir tahun	a. apabila capaian mencapai 100% b. apabila capaian antara 90% s/d < 100% c. apabila capaian antara 80% s/d < 90% d. apabila capaian antara 70% s/d < 80% e. apabila capaian < 70%	5 4 3 2 1
	b. Capaian realisasi keuangan pada akhir tahun	a. apabila capaian antara 90 % s/d 100% b. apabila capaian antara 85% s/d < 90% c. apabila capaian antara 80% s/d < 85% d. apabila capaian antara 75% s/d < 80% e. apabila capaian < 75%	5 4 3 2 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
2.	Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP	a. RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya b. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan c. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan d. RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan e. RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan	5 4 3 2 1
	b. Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
	1) proses pengadaan barang dan jasa konstruksi	a) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Maret tahun berkenaan b) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan April tahun berkenaan c) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan d) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Juni tahun berkenaan e) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Juni tahun berkenaan	5 4 3 2 1
	2) proses pengadaan barang dan jasa non konstruksi	a) apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan b) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juni tahun berkenaan c) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan d) apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan e) apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Agustus tahun berkenaan	5 4 3 2 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
3.	Jumlah Revisi DPA SKPD	a. apabila tidak ada revisi DPA-SKPD	5
		b. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 1 kali	4
		c. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 2 kali	3
		d. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 3 kali	2
		e. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan lebih dari 3 kali	1
4.	Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (triwulan I – IV)	a. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $\geq 80\%$	5
		b. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $70\% \leq < 80\%$	4
		c. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $60\% \leq < 70\%$	3
		d. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $50\% < 60\%$	2
		e. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai $< 50\%$	1
C.	PELAPORAN		
1.	Ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset per triwulan (triwulan I – IV)	a. apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi	5
		b. apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi	4
		c. apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi	3
		d. apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	2
		e. apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	1
2.	Ketepatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui Simdalbangda		
	a. Ketepatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	a. apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya	5
		b. apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya	4
		c. apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya	3
		d. apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya	2
		e. apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	b. Kelengkapan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	a. apabila laporan lengkap 100% b. apabila kelengkapan laporan mencapai 90% s/d <100% c. apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d < 90% d. apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d < 80% e. apabila kelengkapan laporan mencapai <70%	5 4 3 2 1
D.	CAPAIAN		
1.	Capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RKPD		
	a. Capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RKPD	a. apabila capaian indikator kinerja 91% s/d 100% b. apabila capaian indikator kinerja 76% s/d <91% c. apabila capaian indikator kinerja 66% s/d <76% d. apabila capaian indikator kinerja 51% s/d <66% e. apabila capaian indikator kinerja < 51%	5 4 3 2 1
	b. Laporan indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil RKPD	a. apabila laporan disampaikan tepat waktu, yaitu 5 hari kerja setelah triwulan berakhir b. apabila laporan disampaikan 6 s/d 8 hari kerja setelah triwulan berakhir c. apabila laporan disampaikan 9 s/d 11 hari kerja setelah triwulan berakhir d. apabila laporan disampaikan 12 s/d 14 hari kerja setelah triwulan berakhir e. apabila laporan disampaikan lebih dari 14 hari kerja setelah triwulan berakhir	5 4 3 2 1
2	Capaian kinerja dalam e-SAKIP		
	a. Hasil input realisasi kinerja SKPD per triwulan sampai eselon IV	a. apabila diinput tepat waktu, yaitu tanggal 10 setelah triwulan berakhir b. apabila diinput tanggal 11 s/d 15 setelah triwulan berakhir c. apabila diinput tanggal 16 s/d 20 setelah triwulan berakhir d. apabila diinput tanggal 21 s/d 25 setelah triwulan berakhir e. apabila diinput lebih dari tanggal 25 setelah triwulan berakhir	5 4 3 2 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
	b. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	a. apabila capaian IKU 90% s/d 100% b. apabila capaian IKU 75% s/d <90% c. apabila capaian IKU 65% s/d <75% d. apabila capaian IKU 50% s/d <65% e. apabila capaian IKU < 50%	5 4 3 2 1
3.	Capaian nilai IKM	a. apabila nilai IKM 90 s/d 100 b. apabila nilai IKM 80 s/d < 90 c. apabila nilai IKM 70 s/d < 80 d. apabila nilai IKM 60 s/d < 70 e. apabila nilai IKM < 60	5 4 3 2 1
E.	EVALUASI		
1.	Evaluasi AKIP	a. apabila nilai evaluasi AKIP 90 s/d 100 b. apabila nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 90 c. apabila nilai evaluasi AKIP 70 s/d < 80 d. apabila nilai evaluasi AKIP 60 s/d < 70 e. apabila nilai evaluasi AKIP < 60	5 4 3 2 1
2.	Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	a. apabila hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan nihil (tidak ada) dan/atau temuan hasil pemeriksaan hanya bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti/diselesaikan sebelum LHP keluar b. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/ hal-hal yang perlu diperhatikan baik bersifat administratif dan/atau terdapat penyetoran/pengembalian, selesai ditindaklanjuti lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan, terhitung sejak LHP diterima c. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/ hal-hal yang perlu diperhatikan baik bersifat administratif dan/atau terdapat penyetoran/pengembalian, ditindaklanjuti lebih dari 2 bulan, terhitung sejak LHP diterima d. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/ hal-hal yang perlu diperhatikan baik bersifat administratif dan/atau terdapat penyetoran/pengembalian, selesai ditindaklanjuti sebelum 1 bulan, terhitung sejak diterimanya LHP	5 4 3 2 1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		e. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/ hal-hal yang perlu diperhatikan terdapat penyeteroran/pengembalian dan telah ditindaklanjuti sebelum LHP keluar	

2) Kecamatan

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	PERENCANAAN		
1.	Keselarasn DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	a. apabila keselarasn mencapai 100% b. keselarasn mencapai 90% s.d kurang dari 100% c. keselarasn mencapai 80% s.d kurang dari 90% d. keselarasn mencapai 70% s.d kurang dari 80% e. keselarasn mencapai kurang dari 70%	5 4 3 2 1
B.	PELAKSANAAN		
1	Capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun		
	a. Capaian realisasi fisik pada akhir tahun	a. apabila capaian mencapai 100% b. apabila capaian antara 90% s/d > 100% c. apabila capaian antara 80% s/d > 90% d. apabila capaian antara 70% s/d > 80% e. apabila capaian > 70%	5 4 3 2 1
	b. Capaian realisasi keuangan pada akhir tahun	a. apabila capaian antara 90 % s/d 100% b. apabila capaian antara 80% s/d > 90% c. apabila capaian antara 70% s/d > 80% d. apabila capaian antara 60% s/d > 70% e. apabila capaian > 60%	5 4 3 2 1
2.	Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP	a. RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya b. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan c. RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan	5 4 3

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		d. RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan	2
		e. RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan	1
3.	Jumlah Revisi DPA SKPD	a. apabila tidak ada revisi DPA-SKPD	5
		b. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 1 kali	4
		c. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 2 kali	3
		d. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 3 kali	2
		e. apabila revisi DPA-SKPD dilakukan lebih dari 3 kali	1
4.	Ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	a. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai < 80%	5
		b. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d > 80%	4
		c. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d > 70 %	3
		d. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% < 60%	2
		e. apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai > 50%	1
C.	PELAPORAN		
1.	Ketepatan laporan aset per triwulan	a. apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi	5
		b. apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi	4
		c. apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi	3
		d. apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	2
		e. apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi	1
2.	Ketepatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui Simdalbangda	a. apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya	5
		b. apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya	4
		c. apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya	3
		d. apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya	2
		e. apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	1

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
D.	CAPAIAN		
1.	Capaian indikator kinerja organisasi sesuai RKPD	a. apabila capaian indikator kinerja 91% s/d 100% b. apabila capaian indikator kinerja 76% s/d < 91% c. apabila capaian indikator kinerja 66% s/d < 76% d. apabila capaian indikator kinerja 51% s/d < 66% e. apabila capaian indikator kinerja < 51%	5 4 3 2 1
2	Ketepatan Waktu Penerbitan Perdes APBDesa	a. Perdes ditetapkan pada bulan November tahun anggaran sebelumnya b. Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Desember tahun anggaran sebelumnya c. Perdes ditetapkan pada tanggal 16 s/d 31 Desember tahun anggaran sebelumnya d. Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Januari tahun berjalan e. Perdes ditetapkan setelah 15 Januari tahun berjalan	5 4 3 2 1
3.	Fasilitasi Serapan ADD dan DD		
	a.Fasiltasi Serapan ADD	a. apabila serapan mencapai 80% s/d 100% b. apabila serapan mencapai 75% s/d < 80% c. apabila serapan mencapai 65% s/d < 75% d. apabila serapan mencapai 50% s/d < 65% e. apabila serapan mencapai < 50%	5 4 3 2 1
	b.Fasiltasi Serapan DD	a. apabila serapan mencapai 80% s/d 100% b. apabila serapan mencapai 75% s/d < 80% c. apabila serapan mencapai 65% s/d < 75% d. apabila serapan mencapai 50% s/d < 65% e. apabila serapan mencapai < 50%	5 4 3 2 1
4.	Capaian kinerja dalam e-SAKIP		
	a.Hasil input realisasi kinerja SKPD per triwulan sampai eselon IV	a. apabila diinput tepat waktu, yaitu tanggal 10 setelah triwulan berakhir b. apabila diinput tanggal 11 s/d 15 setelah triwulan berakhir	5 4 3 2

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		c. apabila diinput tanggal 16 s/d 20 setelah triwulan berakhir d. apabila diinput tanggal 21 s/d 25 setelah triwulan berakhir e. apabila diinput lebih dari tanggal 25 setelah triwulan berakhir	1
	b. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	a. apabila capaian IKU 90% s/d 100% b. apabila capaian IKU 75% s/d <90% c. apabila capaian IKU 65% s/d <75% d. apabila capaian IKU 50% s/d <65% e. apabila capaian IKU < 50%	5 4 3 2 1
5.	Capaian nilai IKM	a. apabila nilai IKM 90 s/d 100 b. apabila nilai IKM 80 s/d > 90 c. apabila nilai IKM 70 s/d > 80 d. apabila nilai IKM 60 s/d > 70 e. apabila nilai IKM > 60	5 4 3 2 1
E.	EVALUASI		
1.	Evaluasi AKIP	a. apabila nilai evaluasi AKIP 90 s/d 100 b. apabila nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 90 c. apabila nilai evaluasi AKIP 70 s/d < 80 d. apabila nilai evaluasi AKIP 60 s/d < 70 e. apabila nilai evaluasi AKIP < 60	5 4 3 2 1
2.	Tindaklanjut atas Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	a. apabila tidak ada temuan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan atau temuan/rekomendasi/hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan b. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat sebelum 1 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima c. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 1 s/d 2 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima d. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 2 s/d 3 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima	5 4 3 2

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai
		e. apabila temuan hasil pemeriksaan/rekomendasi/hal-hal yang perlu diperhatikan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 3 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima	1

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO